KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI MARITIM DI KABUPATEN TANGGAMUS

(Skripsi)

Oleh

FERDIAN ANUGRAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2018

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION OF TANGGAMUS REGIONAL GOVERNMENT IN SUPPORTING THE ACCELERATION OF MARITIME INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREAS IN TANGGAMUS REGENCY

By
FERDIAN ANUGRAH

This research aims to describe the process of policy implementation of Maritime Industrial Development Areas in Tanggamus Regency and to analyze programs which have been done by the Regional Government in order to support the policy of maritime industrial development areas in Tanggamus Regency.

This research used descriptive research type with qualitative approach. This research was conducted within the territory of Tanggamus Regency, especially in Tanggamus Regional Government. The data sources consisted of primary data and secondary data. The data collection techniques were conducted through field observation, interview with the resource persons and documentation to strengthen the research.

Based on the results and discussion in the previous chapter, it can be concluded that the policy implementation of maritime industrial development areas in Tanggamus Regency was in accordance with the Policy Perspectives Model by Edward III consisting of 4 explanatory variables, such as: The results of this research were viewed from variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. From communication point of view, the policy has been in accordance with the theory of existing communication process, all of the employees have already known and understood the core planning of developing maritime industrial areas. In terms of human resources in the relevant agencies, unfortunately it was still considered as 'poor' because although all of the positions from head of department, secretary, sub head, head of field, head section, were filled by undergraduates and graduates, yet in terms of the division of labor (task and function), it has not been adapted to the ability and expertise. From disposition point of view, in this case the executors of the maritime industrial development areas has performed their duties and responsibilities as expected in the core of instruction. The bureaucratic structure, a coordination between the implementing agency and target groups in the policy implementation of maritime industrial development areas in Tanggamus Regency has been said to be good. The implementation of maritime industrial development areas in Tanggamus

Regency has been appropriate with the role and duties as well as the coordination among the implementing agency as determined by the Central Government. The division of roles was intended to facilitate the implementation of this policy, although each of the implementing agency has different duties and responsibilities, the coordination among them is still needed.

From the four variables above, it can be concluded that the policy of maritime industrial development areas needs more than a careful planning, thus, it will not run well in the absence of communication, resources, disposition/the good and supportive characteristics of employees and the structure of bureaucracy from the implementing agency.

Keywords: Regional Government Policy, Development Acceleration, Maritime Industrial Area.

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI MARITIM DI KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh
FERDIAN ANUGRAH

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai proses Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Tanggamus. Dan menganalisis apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Tanggamus dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan didalam lingkup wilayah Kabupaten Tanggamus, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. Sumber data yang penulis lakukan diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan Observasi (pengamatan) secara langsung lapangan, wawancara *(interview)* kepada para narasumber dan pengambilan dokumentasi untuk memperkuat penelitian.

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai implementasi kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus dalam persepektif Model Kebijakan Edward III yang terdiri dari 4 variabel penjelas yaitu sebagai berikut :

Hasil penelitian ini ditinjau dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk komunikasi sudah sesuai dengan teori proses komunikasi yang ada, kemudian seluruh pegawai sudah mengetahui dan memahami perencanaan pembangunan kawasan industri maritim ini. Dari segi sumber daya manusia di Dinas terkait, masih dikatakan kurang baik/buruk hal ini dikarenakan semua pegawai yang mempunyai jabatan mulai dari kepala dinas, sekretaris, kepala sub bagian, kepala bidang, kepala seksi, baik ditingkat sarjana dan pasca sarjana/magister. Namun dalam hal pembagian kerja (tugas dan fungsi) belum disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian. Disposisi, dalam hal ini pelaksana kebijakan pembangunan kawasan industri maritim menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pusat. Struktur Birokrasi, koordinasi antar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran dalam Implementasi kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten

Tanggamus sudah dapat dikatakan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus ini telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar intansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan.

Dari 4 variabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan kawasan industri maritim ini meskipun perencanaan yang sudah sangat matang, namun tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya komunikasi, Sumber daya, disposisi/karakater pegawai (Staf) yang baik dan mendukung, dan struktur birokasi dari para pelaksana/implementor.

Kata kunci:Kebijakan Pemerintah Daerah, Percepatan Pembangunan, Kawasan Industri Maritim.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI MARITIM DI KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

FERDIAN ANUGRAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI MARITIM DI KABUPATEN TANGGAMUS**

Nama Mahasiswa : *Ferdian Anugrah*

No. Pokok Mahasiswa : 1416041036

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.** .....

   Sekretaris : **Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.** .....

   Penguji Utama : **Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 April 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 16 April 2018

Yang membuat pernyataan,

Ferdian Anugrah
NPM. 1416041036

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ferdian Anugrah, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 23 Desember 1995. Penulis merupakan anak kelima dari lima saudara, dari pasangan Bapak Bahran Syafawi dan Ibu Siti Rosnila. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Kartini 2 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2002. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Palapa yang diselesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 18 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui jalur Mandiri. Pada tahun 2017, penulis melaksanakan KKN di Desa Sri Kencono Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa pernah mengikuti Organisasi Intra Kampus, yaitu Organisasi Himpunan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara sebagai Anggota Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) sedangkan Organisasi Ekstra

kampus yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai Anggota Bidang Sospol dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung sebagai Anggota Bidang Aksi dan Propaganda (AKSPRO).

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah“

(HR.Turmudzi)

“Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya”

(Mahatma Gandhi)

“Jalani dengan ikhlas apa yang sudah di perintahkan tuhan terhadapmu, karna jika manusia tidak sanggup membalas jasamu, Allah lah yang akan membalas seluruh jasa yang pernah kau kerjakan di dunia ini dengan kenikmatan surga di akhirat kelak”

(Dr. Zakir Abdul Karim Naik)

“Jika tidak ingin menjadi manusia yang maju jangan menghambat manusia yang ingin berkembang”

(Ferdian Anugrah)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan menyebut nama ALLAH SWT

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Mama Tercinta

Kakak- Kakaku Tersayang

Terima kasih untuk semua dukungan baik moril maupun materil, kasih sayang dan segala doa untukku.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Para pendidik dan Almamater tercinta...

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Tanggamus", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Terimakasih untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Bahran Syafawi dan Ibunda Siti Rosnila. Terima kasih atas kasih sayang yang telah Mama dan Ayah berikan kepadaku, terimakasih atas semua do'a, motivasi, pengorbanan, didikan yang selama ini kalian berikan kepadaku hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan studiku sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik. Semoga dengan mendapatkan gelar S.AP ini aku bisa membahagiakan Ayah dan Mama, Amin.

2. Terimakasih untuk Kakak- Kakakku, Udo Syamsu, Uwo Bety, Dongah Deni, Docik Dedy untuk selalu mendukung Adek Ferdian dalam hal apapun itu, kita semua harus jadi anak kebanggaan Ayah dan Mama.dan membahagiakan mereka berdua, kita harus tetep semangat untuk jalanin suka duka keluarga, harus jadi adik kakak yang selalu mendukung satu sama lain, dan kita buktiin kalau kita semua Sukses dan jadi kebanggaan Ayah dan Mama. Amin
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih pak atas bimbingan dan motivasi serta masukannya yang banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
4. Ibu Selvi Diana Meilinda. S.AN., MPA selaku dosen pembimbing kedua. Penulis mengucapkan terima kasih atas motivasi, saran dan bimbingannya yang sangat banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
5. Ibu Intan Fitri Meutia. M.A., Ph.D selaku dosen penguji. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan serta masukan, saran dan bimbingannya yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.

6. Ibu Dewie Brima Atika, S. IP., M. Si. selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih pak atas nasehat, arahan, motivasi dan ilmu yang diberikan selama proses pendidikan hingga saat ini.
7. Bapak Dr. Noverman Duadji, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Intan Fitria Meutia, M.A., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ibu Ita, Ibu Devi, Ibu Dian, Ibu Novita, Prof Yulianto, Pak Eko, Pak Nana, Pak Bambang, Pak Syamsul, Pak Simon, Pak Fery, Pak Izul, Ibu Meiliyana, Ibu Rahayu, Ibu Anisa, terimakasih banyak untuk semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
10. Ibu Nuraini dan Pak Ashari selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang selalu membantu dalam hal administratif. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya selama ini.
11. Segenap Informan Penelitian di Dinas BAPPEDA Kabupaten Tanggamus: Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Karjiono selaku (Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan), Bapak Yadi Mulyadi, ST selaku (Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang), Bapak Darma Setiawan, S.Kom., MM selaku (Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya), Bapak Bastanta Sebayang, SP, MM selaku (Kepala Sub. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah), Bapak Feri Septiawan, SE,MM selaku (Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah), Bapak Gustam Apriyansyah,

S.Sos,. MM selaku (Kepala Bidang Pengendalian), Bapak Sujono selaku (warga kecamatan Limau), Ibu Yosi Yana Feviyanti, S.Kom selaku (Staf Bagian Tatalaksana Kegiatan), Ibu Siti Rahmah, S.I.Kom selaku (Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian). Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu atas informasi dan juga data-data, bantuan, izin, dan juga waktu luang yang telah diberikan kepada penulis, penulis merasa sangat terbantu dengan bantuan-bantuannya dalam proses turlap, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada para sahabat bujang yaitu Ijam (Orang yang selalu ngikutin alur) terimakasih jam udah mau nemenin kesana kemari, semoga cepet move on ya cuy. Adi (anak santai) terimakasih atas canda tawa aneh nya, semoga lancar mencapai gelarnya di. Aggy (bucin) terimakasih ggy atas canda tawa malamnya, semoga cepet dapat gelarnya di kota orang sana dan gak bucin lagi. Alip (orang balak kosong) terimakasih lip atas kebersamaannya, semoga sukses dengan baju loreng tentronya. Andey (si anak uus) terimakasi bik atas rumahnya tempat nyaman buat ngilangin penat, semoga dilancarin mencapai gelar S.H. Nay (si anak kasbun) terimakasih nay atas keasikannya, semoga cepet diberikan berkah biar ngampus terus. Bima (iyay ny mami) terimakasi cot atas keisengannya, semoga cepet jadi sama Tri adha. Fani (si generasi mata ceper) terimakasih ni atas kegilaannya, semoga cepet diberi anugrah kembali kejalan yang benar. Alan (orang baperan) terimakasih mot atas bantuan-bantuannya, kurangin baperannya mot. Ojan (si anak bujang kampung) terimakasih jan atas keanehannya dan udah mau bantuin hal apapun, semoga cepat diberi jodoh. Olan (si anak batak yang

dipanggil ucok) terimakasih cok atas kebersamaannya, semoga cepat jadi lawyers kondang. Tihow (selalu stel ganteng kalau depan cewek) terimakasih how udah mau nemenin skripsian sampe subuh, semoga cepet dapet gelar S.Hny. Rendi (orang yang suka ngide) terimakasih ndro atas tingkah anehnya, semoga sukses ngaspalnya. Renol (anak santai tapi pasti) terimakasih nol atas tempat tinggalnya kalau lagi liburan ke jakarta, semoga makin pinter ngeracik obatnya. Umagh (ajo nya oma) terimakasih magh atas ke seruannya, semoga cepat diberi hidayah buat ngerjain skripsinya. Tamir (anak yang pasti dikenal orang) terimakasih mir atas kebersamaanya, kurang-kurangin kaya ulamanya mir. Sekali lagi terimakasih buat kalian udah kaya keluarga kedua yang selalu saling suport, teman traveling kemanapun, dan selalu membantu dalam hal apapun. Semangat terus ya skripsinya jangan pernah males pokoknya, malesnya harus dilawan supaya cepet wisuda dan dapet gelarnya masing-masing, sukses bareng kawan, Amin.

13. Sahabatku yang selalu menemani selama 4 tahun di jurusan Ilmu Administrasi Negara yaitu Anggi Setiawan (Orang aneh yang bisa buat dosen semua ketawa) terimakasih nggi atas kata-kata mutiaranya, semoga sukses bareng, amin. Ahmad Febrian Harahap (Tandemnya anggi kalau udah ngupok kalau bahasa Indonesianya ngomongin orang) terimakasih ya lur pernah nerima saat gua diusir sama orangtua gua walaupun beberapa hari, cepet lagi nyusul jangan pacaran terus, Holil Wibowo (Orang yang selalu carper depan dosen) terimakasih leng untuk selalu ngingetin kalau ada tugas, tetap semangat ya skripsi nya dan kurang-kurangin yang bisa dikurangin sukses bareng pokonya, amin. Julian Handiko (Tergila-gila bener jadi anggota

Polisi) terimakasih ko untuk selama ini selalu buat ketawa dikampus, semangat terus ya nyusun skripsinya jangan males-malesan, karena pendidikan itu harus diutamakan. Nihan Djohan (Manusia lupaan selalu tiap kali nanya pasti diulang-ulang) terimakasih yang hok selalu dateng diseminar gua semangat terus ya skripsinya, yakin bentar lagi wisuda, amin. Ferry Andrian (Hip-Hop Metro) terimakasih ngeng selalu jadi bahan kongekan dikampus selama 4 tahun ini semangat dong skripsinya jangan males*an biar cepet wisuda. Fazry (Temen bareng ngurus skripsi) terimakasih jur selalu bareng ngurus skripsi sana-sini. Ditho (Anak basket kebanggan jurusan) terimakasih gong selalu ngabarin dosen kalau udah ada dikelas. Widi (Gampangan banget kena rayuan perempuan) terimakasih wid udah mau bareng-bareng terus, diurus skripsinya jangan perempuan aja yang diurusin. Trias Cininta (si anak traveling sampe lupa arah kampus) terimakasih cin atas bantuan apapun yang pernah ada selama 4 tahun ini, cepet lagi selesain gelarnya biar cepet dilamar. Tanicha (temen dari Sd sampe kuliah bareng terus) terimakasi cha selalu buat ketawa dengan candaan nya, canda tawa kalian semua yang nantinya bakal bikin kangen, kalian adalah sahabat terbaik sukses bareng semua jangan lupa saat ketemu kembali dilain waktu nanti.

14. Gelas Antik (Adi Black, Adi kurniawan, Alvin, Ana, Andra, Andriyanto, Anggi Lestari, Annisa Yurida, Vita, Arif, Arizal, Astri, Athiya, Bella, Binter, Daiska, Deni, Desriyanto, Desy, Dian, Dinda, Sari, Anung, Ely, Adon, Fadly, Faiz, Fatra, Gusty, Herwan, Hiro, Idris, Istiqomah,Istie R, Tije, Reza, Nana, Meli, Mia, Ma’ruf, Ara, Nabila Aisyah, Nabila Cho,Nadya, Ni’mah, Niza, Fungki, Nur Arifah, Asih, Hasan, Idin, Laila, Oci, Okta, Rani, Refi, Regi,

Rifki, Ririn, Robi, Roi, Rydho, Sandi, Sangga, Satria, Septika, Sintong, Sisca, Taufik, Tengku, Tiyasz, Triaz, Tuti, Wahyu Hidayat, Wahyu Syawaldi, Yumas, Heni) maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaan dan dukungannya selama proses perkuliahan. Semoga kita sukses semua, Amin.

15. Terimakasih kepada Keluarga Besar Himpunan Administrasi Negara (bang Ari 01, bang Sindang 08, Iyay Yondri 08, bang Dede 09, bang nyom 09, bang guruh 09, bang mamang 09, bang Aden 10, bang Ridho 10, mas Loy 10, bang Alsya 10, bang Denish 12, bang Danu 12, bang Alga 12, bang Kiki 12, dan Dimas 13) maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih abang-abang sudah memberi pelajaran dan ilmu yang diberikan.
16. Terimakasih kepada Lidiya Karensa yang selalu support saya, yang selalu menemani dalam pengerjaan skripsi ini. Makasih juga sudah meluangkan waktu untuk dengerin keluh kesah saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, dan mengajarkan saya untuk terus semangat, dan sabar.
17. Terimakasih kepada Keluarga Besar PT. Menggala Berseri (Boss Jordan, Bang Ambon, Koh Adi Sung, Bang Kasron, Okong, Sabil onggok, Fikar, Daniel) terimakasih buat kalian yang sudah mau menerima saya mengenal bagaimana kerasnya dalam pekerjaan dan membuka mata memperkenalkan dunia sesungguhnya, sukses selalu dan selalu lancar eksport karetnya.
18. Teman-teman KKN desa Sri Kencono Baru, Kecamatan Bumi Nabung. Ungkas, Dea, Desty, Diah, Ica, Mamang. Terimakasih atas pengalaman berharga selama 40 harinya.

19. Seluruh pihak yang membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih untuk semuanya.

Semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandarlampung, 16 April 2018

Penulis

Ferdian Anugrah

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 9
   1. Pengertian Kebijakan Publik 9
   2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 11
B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan 14
   1. Pengertian Implementasi Kebijakan 14
   2. Model Proses Implementasi Kebijakan 17
C. Tinjauan Tentang Pembangunan 25
   1. Konsep Pembangunan 25
   2. Perencanaan Pembangunan Daerah 26
D. Tinjauan Tentang Kawasan Industri 27
   1. Kawasan industri 27
   2. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri 27
E. Tinjauan Tentang Kemaritiman 29
   1. Pengertian Kemaritiman 29
   2. Aspek-aspek Kemaritiman 30
   3. Kemaritiman Indonesia Saat Ini 31
F. Kerangka Pikir 33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 35
B. Fokus Penelitian 37
C. Lokasi Penelitian 39
D. Sumber Data 40

E. Tekhnik Pengumpulan Data 42
F. Teknik Pengolahan Data 44
G. Teknik Analisis Data 45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Tanggamus 46
1. Letak Geografis Kabupaten Tanggamus 46
2. Sejarah Kabupaten Tanggamus 47
3. Kependudukan Kabupaten Tanggamus 49
4. BAPPEDA Kabupaten Tanggamus 50
B. Hasil Penelitian 55
1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri Maritim Di Kabupaten Tanggamus 56
2. Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Daerah Tanggamus Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri Maritim Di Kabupaten Tanggamus 75
C. Pembahasan 83
1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri Maritim Di Kabupaten Tanggamus 83
2. Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Daerah Tanggamus Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri Maritim Di Kabupaten Tanggamus 96

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 99
B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi Kebijakan 19
2. Daftar Informan..... 42
3. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Tahun 2016 -2017 49
4. Staf Pelaksana BAPPEDA Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Maritim Di Kabupaten Tanggamus 61
5. Wilayah Penggunaan Lahan Pembangunan Kawasan Industri Maritim Di Kabupaten Tanggamus 64
6. Tahapan Rencana Kebutuhan Pembangunan Kawasan Industri Maritim 66
7. Perusahaan Pertambangan Yang Telah Dan Mulai Berproduksi..... 76
8. Wilayah Objek Dan Daya Tarik Wisata 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Proses Kebijakan Publik 12
2. Model Kerangka Pemikiran 33
3. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Tanggamus 55
4. Kegiatan Pembukaan Lahan 63

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah di Indonesia mengalami pasang surut dan terus dilakukan pembangunan secara merata disetiap daerah untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga perlu adanya percepatan pembangunan daerah sesuai dengan prinsip otonomi agar tercipta pemerataan pembangunan serta dalam rangka peningkatkan potensi daerah secara optimal. Diamanatkan dalam program pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang bahwa pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat dan meningkatkan ekonomi daerah.

Pembangunan merupakan pencerminan kehendak rakyat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Diperlukan pemahaman masyarakat tentang pembangunan melalui strategi pencapaiannya agar tercapai secara optimal. Berdasarkan pada kondisi strategis Indonesia maka pemerintah sejak awal telah mencanangkan untuk menaruh perhatian sebesar-besarnya pada pembangunan kemaritiman yang salah satunya adalah dengan menyatakan Indonesia sebagai

poros maritim dunia dengan mengagendakan lima pilar utama pembangunan. Kelima pilar itu ialah pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, pembangunan infrastuktur dan konektivitas antar pulau. Keempat, diplomasi maritim digalakkan dan ditingkatkan. Kelima, memperkuat pertahanan martitim. *(sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/001/ dunia_kerja _ nyata, diakses pada tanggal 13 November 2017, pukul 10:00 WIB)*

Jika dikaitkan dengan pembangunan industri maritim yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan kemaritiman di Indonesia, dan Kabupaten Tanggamus yang membutuhkan pembangunan maka, pentingnya kegiatan pembangunan industri maritim yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Tanggamus ialah manufaktur maritim seperti pembuatan kapal dan pelabuhan. Industri perkapalan mempunyai banyak sektor-sektor industri yang dapat dikembangkan pada industri kapal. Kawasan industri maritim di Indonesia pun kembali diproyeksikan di Provinsi Lampung tepatnya di Kabupaten Tanggamus, dalam kaitannya terhadap pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus yang berlokasi di Kawasan Batu Balai dan sekitarnya dalam perencanaannya membutuhkan lahan sepanjang pesisir Teluk Semangka mulai dari pesisir Kecamatan Kota Agung Timur hingga Pesisir Kecamatan Cukuh Balak.

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan, dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan pada tanggal 21 Maret 1997 oleh Menteri Dalam Negeri. Secara administratif, ketika terbentuk Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 (sebelas) Wilayah Kecamatan dan 6 (enam) Wilayah Perwakilan Kecamatan. Dengan adanya Kabupaten Tanggamus yang masih terbilang baru maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus masih sangat membutuhkan pembangunan yang membuat perubahan pada kemakmuran daerah serta mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Pemda Tanggamus sudah menawarkan investasi kepada investor yang dimana pembangunan kawasan industri maritim tersebut sudah di investasi oleh PT. Rapindo Jagad Raya dan PT.Pertamina, sebagai perusahaan penawaran berencana untuk berinvestasi mengembangkan kawasan ini menjadi salah satu kawasan pengembangan industri docking dan pembuatan kapal terbesar di Indonesia dengan nilai investasi Rp. 4.000.000.000.000, (empat trilyun rupiah) pada lahan yang akan digunakan seluas 3,500 hektar. *(sumber: Profil investasi pembangunan kawasan industri maritim Kabupaten Tanggamus, BAPEDDA TANGGAMUS, tahun 2017)*

Pembangunan dan pengembangan industri juga sesuai dengan pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, juga diterbitkan Peraturan Presiden nomor 48 Tahun 2014

tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Setelah pengkajian ulang agar tercapainya percepatan pembangunan kawasan industri maritim yang sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.154/20/12/2011 Tentang Persetujuan Prinsip Kawasan Industri Maritim. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk mencari dukungan untuk pengembangan kawasan industri maritim baik dari pemerintah pusat yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Kementerian Perindustrian Direktorat Industri Maritim, KADIN Indonesia, Otorita Batam, Biro Klasifikasi Indonesia, klasifikasi Asing dan dari pihak swasta membuahkan hasil ini dibuktikan dari dukungan Pemerintah Pusat dalam kegiatan potensi tentang pengembangan kawasan khusus *industri ship recycle yard* di lokasi adalah Kabupaten Tanggamus.

Hal-hal yang menunjang pembangunan industri maritim di Kabupaten Tanggamus di antaranya yaitu daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan mempunyai Teluk Semangka yang dimana karakter laut dari Teluk Semangka ini merupakan kawasan laut tenang dengan kedalaman yang memadai, oleh karena itu Kabupaten Tanggamus dipilih sebagai salah satu program strategi nasional yaitu pembangunan kawasan industri maritim yang sudah masuk kreteria. Dimana proyek strategi nasional (PSN) di Provinsi Lampung memiliki 3 proyek strategi nasional yaitu program pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus, pembenahan bandara Radin Inten II, dan pembuatan jalan bebas hambatan (TOL) Trans Sumatra, yang sebagaimana dituangkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.154/20/12/2011 Tentang Persetujuan Prinsip Kawasan Industri Maritim. Potensi industri perkapalan saat ini belum dimaksimalkan dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh rendahnya minat investor terhadap industri ini, terkait dengan karakteristik industri perkapalan padat modal, padat karya, pengembalian modal lambat serta penambahan nilai rendah. Selain itu produktivitas industri perkapalan yang sangat rendah karena peralatan produksi yang sudah tidak layak, serta tingginya kandungan komponen impor dan kurangnya kemampuan dalam mendesain serta lamanya waktu menyelesaikan pesanan pembutan kapal, merupakan masalah yang dihadapi industri maritim khususnya industri perkapalan baik industri pembuatan kapal baru maupun industri perbaikan kapal.

Jika dilihat dari penjelasan dari kendala-kendala dalam pengembangan industri perkapalan diatas, maka sesungguhnya hal-hal tersebut bisa dijadikan suatu potensi atau peluang pengembangan industri perkapalan. Salah satu poin yang bisa dijadikan contoh yaitu kandungan komponen industri perkapalan mengindikasikan bahwa kurangnya produksi komponen tersebut di dalam negeri, hal tersebut bisa dijadikan peluang di subsektor industri komponen kapal yang produksinya dibutuhkan industri galangan kapal yang tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Tujuan dari adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kawasan industri maritim adalah sebagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarkat daerah Kabupaten Tanggamus serta meningkatkan pelayanan guna pemerataan

pembangunan infrastuktur di Indonesia. Kawasan industri maritim merupakan suatu kawasan klaster industri pembangunan kapal baru, bangunan lepas pantai, reparasi kapal, dan *ship recycle* (penutuhan kapal). Serta dilengkapi dengan industri penunjang dan dukungan perusahaan *logistic* atau *supply* kebutuhan material dan komponen kapal. Dasar hukum dalam pengembangan kawasan Industri maritim secara umum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dan peraturan pelaksananya adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.

Pembangunan kawasan industri maritim ini jelas akan berdampak besar terhadap lingkungan disekitarnya dengan istilah lain dapat disebut *multiplier effect*, dalam hal ini akan terdapat dua aspek yang akan berpengaruh besar yaitu pengaruh terhadap aspek bangkitan lalu lintas dan juga aspek ketersedian tenaga kerja dalam kaitannya terhadap kebutuhan berbagai fasilitas sosial pembangunan suatu kawasan industri. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan kawasan industri maritim ialah beberapa lokasi seperti Kecamatan Kota Agung Timur pekon Sukabanjar dan Kecamatan Limau pekon Ketapang yang dimana pembebasan lahan tak kunjung selesai dikarenakan penduduk asli yang ingin menetap serta negosiasi harga lahan yang tidak mencapai kesepakatan. Serta proses perizinan pembangunan dan perizinan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang memakan waktu lama membuat proses perizinan tak kunjung selesai.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Tanggamus".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus di tahun 2016-2018?
2. Apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Tanggamus dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mengenai proses Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Tanggamus.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Tanggamus dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya di bidang kebijakan publik, serta penelitian ini juga dapat mengaplikasikan materi-materi pengajaran mengenai kebijakan publik tentang kawasan industri maritim.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenanganya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelsaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi di masyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat dapat dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri.

Kebijakan harus mempunyai hasil yang signifikan dalam penyelsaian masalah yang sedang terjadi. Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan pada masyarakat pelayanan apa yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu.

Menurut Friedrich sebagaimana dikutip dalam Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Jones dalam Winarno (2007:16), istilah kebijakan (*policy term)* digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan *grand design*. Sedangkan menurut pendapat Wahab (2005:1) kebijakan sering disama-artikan dengan pengertian kebijaksanaan. Istilah *"policy"* seringkali diartikan sebagai tujuan *(goals)*, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan,

dan rancangan-rancangan besar. Definisi kebijakan publik yang paling populer atau dikenal adalah pendapat dari Dye, 1995 dalam Agustino (2012:7) yang berbunyi kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dye mengatakan, jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus memiliki tujuan dan kebijaksanaan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Definisi lainnya mengenai kebijakan publik yang ditawarkan oleh Anderson dalam Winarno (2007:18) menggambarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada kegiatan yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada kegiatan yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau keputusan yang dibuat individu, kelompok dan aparat pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai tujuan yang telah dibuat untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu pemerintah daerah mesti selalu berinovasi dan berfikir keras dalam mengatasi permalahan yang terjadi di masyarakat serta mempehitungkan dampak yang akan terjadi dalam penentuan kebijakan.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, banyak para ahli yang mengkaji kebijakan publik dalam membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan ini bermaksud untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Menurut Dunn dalam Winarno (2007: 32-34) tahap-tahap penyusunan kebijakan adalah:

Gambar 1. Proses Kebijakan Publik

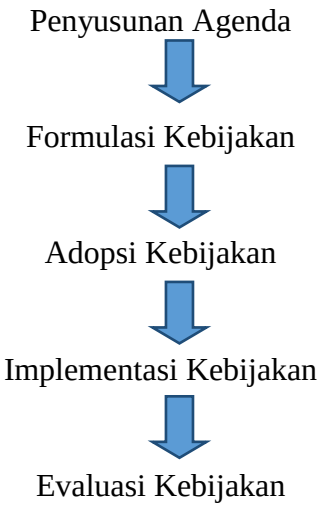

Sumber: Dunn dalam Winarno (2007: 32-34)

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak

disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives atau policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat

bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap-tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dan mengetahui dampak atau tujuan yang terjadi disaat pelakasanaan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan UU. Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan UU dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program yang telah dibuat.

Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berati *to*

provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembagapemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Selain itu menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Sementara itu, Grindle dalam Winarno (2007:146) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam suatu kebijakan.

Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) dalam Wahab (2005:65), menjelaskan makna implementasi ini dengan menjelaskan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari ketiga pendapat para ahli di atas, dapat disederhanakan bahwa pendapat Mazmanian dan Sabatier tentang implementasi lebih terfokus pada apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut secara tegas, agar proses pelaksanaannya yang berupa kegiatan-kegiatan tidak melenceng dari apa yang telah ditetapkan. Sedangkan, tidak jauh berbeda dengan Mazmanian dan Sabatier, Van Meter dan Van Horn mengemukakan selain proses dan pencapaian tujuan, implementasi juga harus melihat kelangsungan dari kebijakan tersebut agar dapat ditransformasikan menjadi pola pola operasional, intinya bahwa implementasi kebijakan tersebut pada dasarnya harus berkelanjutan. Terakhir, pendapat dari Grindle juga memiliki persamaan dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang memberikan penjelasan bahwa implementasi kebijakan harus berfokus pada tujuan kebijakan, agar *output* dan *outcome* tidak menyimpang dari apa yang diharapkan.

2. Model Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Dalam analisis kebijakan pubik telah banyak dikembangkan model-model yang membahas tentang implementasi kebijakan, untuk menganalisis bagaimana proses tersebut berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

Pada sejarah perkembangan implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan *Top Down dan Bottom Up*. Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya. Sekalipun banyak yang menganut aliran *top down*, namun dalam hal ini hanya akan menguraikan beberapa model implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli. Berikut beberapa model-model implementasi kebijakan dari berbagai ahli:

a. Model yang dikembangkan oleh George C. Edward III

Pada model ini menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikominukasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Hal tersebut dapat berjalan apabila komuniksi berjalan dengan baik. Secara umum tiga hal yang penting dalam indikator ini yaitu: transmisi, konsisten, dan kejelasan.

2) Sumber daya

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Sumber daya manusia sebagai implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi untuk melakukan tindakan dan berkompeten dibidangnya. Secara umum empat hal yang penting dalam indikator ini yaitu: staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

3) Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Jika pelakasanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka implementor kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi

juga harus memiliki kemapuan untuk melaksanakannya. Secara umum dua hal yang penting dalam indikator ini yaitu: pengangkatan birokrat dan insentif.

4) Struktur Organisasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi *infektivitas* implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan Pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Tabel 1. Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi Kebijakan

ASPEK	RUANG LINGKUP
Komunikasi	a.Implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan b.Sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan • Metode yang digunakan • Intensitas Komunikasi
Sumber Daya	a.Kemampuan Implementor • Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program • Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan b.Ketersediaan Dana • Dana yang dialokasikan • Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan

Disposisi	Karakter Pelaksana a. Tingkat komitmen dan kejujuran dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan.Semakin sesuai dengan standar semakin tinggi komitmen itu sendiri. b. Tingkat demokratis dapat dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dan masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan standar guna mencapai tujuan dan sasaran program.
Struktur Birokrasi	a.Ketersediaan SOP yang mudah dipahami b.Struktur organisasi, rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program.

Sumber:Indiahono (2009,34)

b. Model yang dikembangkan oleh Merilee S, Grindle

Model ini dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin ingin diraih yang tediri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

1) *Content of Policy*

a) Kepentingan yang mempengaruhi

Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejumlah kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b) Tipe manfaat

Pada poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaksan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasia kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c) Derajat perubahan yang ingin dicapai

Pada poin ini berupaya seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d) Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada poin ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e) Pelaksanaan program

Dalam menjalankan suatu program atau kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f) Sumber daya yang digunakan

Pelaksanaan kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) *Context of Policy*

a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi ang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan gagal.

b) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Lingkungan diaman suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

c. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan *top down* yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi

dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kebijakan publik tersebut, adalah:

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas engan sosio-ukur yang ada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya financial dan sumberdaya waktu.

3) Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap/kecendrungan (*disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasaalahan yang mereka raakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Sejauh mana lingkungan eksternal urut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

C. Tinjauan Tentang Pembangunan

1. Konsep Pembangunan

Indonesia sebagai negara berkembang, membutuhkan sebuah kerja keras seluruh pihak dalam meningkatkan bangsa Indonesia menuju suatu negara yang maju. Hal ini, tentu tidak hanya diisi atau di lakukan oleh pemerintah, tetapi seluruh elemen bangsa Indonesia. Sejarah panjang proses terbentuknya negara Indonesia juga membuktikan bahwa Indonesia terbentuk atau berdiri atas dasar seluruh pihak untuk melebur dan membentuk suatu engara yang kini dikenal dengan Indonesia. Suatu negara yang tengah beranjak, diperlukan sebuah pembangunan, yang melihat dari berbagai sisi. Menurut Nugroho (2004:9) pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Kartasasmita (1994:57) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa

pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005:45).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai pembangunan artinya kita berbicara mengenai perubahan, kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola pikir masyarakat, serta perilaku dan gaya hidup masyarakat.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebelum menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah, perlu dipahami terlebih dahulu perencanaan pembangunan. Menurut Riyandi dan Dedy Bratakusumah (2004:6) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan

pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksana kegiatan pembangunan (*Action Plan*). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik dari suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada azaz prioritas.

D. Tinjauan Tentang Kawasan Industri

1. Kawasan industri

Di negara Indonesia pengertian kawasan industri dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Menurut Djojodipuro dalam Pratiknya (2007:74), kawasan industri (*industrial estate*) merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.

2. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri

Tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat di simak di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri yang mempunyai tujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan daya saing investasi, dan memberikan jaminan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkordinasi antar sektor terkait.

Menurut Sukirno dalam Pratiknya (2007:66) penciptaan kawasan perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah tersebut, dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagai berikut : menghemat pengeluaran pemerintah untuk menciptakan prasarana, untuk menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri, dan untuk menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat dan memaksimalkan peran pembangunan daerah dalam keseluruhan pembangunan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor yang lebih penting lagi yang mendorong usaha menciptakan kawasan perindustrian adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh berbagai industri apabila fasilitas yang demikian disediakan kepada para investor.

Oleh sebab itu pengembangan kawasan perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang kepada para investor. Langkah tersebut akan mengurangi masalah untuk menciptakan atau mendapatkan tempat bangunan dan

dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat disewa atau dibeli dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Selain itu kawasan perindustrian dapat menimbulkan berbagai jenis *external economies* kepada industri-industri tersebut. Dengan demikian adanya pertumbuhan industri dalam kawasan industri dapat mempertinggi efisiensi kegiatan industri tersebut.

E. Tinjauan Tentang Kemaritiman

1. Pengertian Kemaritiman

Pengertian kemaritiman Istilah maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu *maritime*, yang berarti navigasi, maritim atau bahari. Dari kata ini kemudian lahir istilah *maritime power* yaitu negara maritim atau negara samudera. Pemahaman maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan atau perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah terminologi kelautan dan maritim terminologi yang berkenaan dengan laut, yang berhubungan dengan pelayaran perdagangan laut.

Pengertian kemaritiman yang selama ini diketahui oleh masyarakat umum adalah menunjukkan kegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan, sehingga kegiatan di laut yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi atau penangkapan ikan bukan merupakan kemaritiman. Dalam arti lain kemaritiman berarti sempit ruang lingkupnya, karena berkenaan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Sedangkan pengertian lain dari kemaritiman yang berdasarkan pada termonologi

adalah mencakup ruang atau wilayah permukaan laut, *pelagik* dan *mesopelagik* yang merupakan daerah subur di mana pada daerah ini terdapat kegiatan seperti pariwisata, lalulintas, pelayaran dan jasa-jasa kelautan. (*Sumber: 0914.blogspot.co.id/2014/12/kemaritiman.html diakses pada tanggal 13 Januari 2018, pukul 10:00 WIB*)

2. Aspek-aspek kemaritiman

a. Aspek sosial budaya

Menurut Koentjaraningrat (2002), sosial adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau kemasyarakatan atau dapat juga berarti suka memperhatikan kepentingan umum (kata sifat). Budaya dari kata *Sans* atau *Bodhya* yang artinya pikiran dan akal budi. Budaya ialah segala hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta, rasa dan karsa. Dapat berupa kesenian, moral, pengetahuan, hukum, kepercayaan, adat istiadat, & ilmu. Sosial Budaya adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya dalam kehidupan bermasyarakat Secara sederhana kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa. Sebenarnya budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu budhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. (*Sumber: 0914.blogspot.co.id/2014/12/kemaritiman.html diakses pada tanggal 13 Januari 2018, pukul 10:00 WIB*)

b. Aspek Sosial Ekonomi

Sisi Rencana Pembangunan Nasional, ditinjau dari sisi ini dimaksudkan agar proyek dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa dan menumbuhkan industri lain.

c. Aspek Sosial Politik

Politik berasal dari kata *politics* dan atau *policy* artinya berbicara politik akan mengandung makna kekuasaan (pemerintahan) atau juga kebijaksanaan. Pemahaman itu berlaku di Indonesia dengan tidak memisahkan antara *politics* dan *policy* sehingga kita menganut satu paham yaitu politik. Hubungan tersebut tercermin dalam fungsi pemerintahan negara sebagai penentu kebijaksanaan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sebagai tujuan yang ingin diwujudkan sehingga kebijaksanaan pemerintahan negara itu haruslah serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

3. Kemaritiman Indonesia saat ini

Berkaca dari masa lalu, melihat bagaimana kejayaan masa lampau diperoleh karena mengoptimalkan potensi laut sebagai sarana dalam suksesnya perekonomian dan ketahanan politik suatu negara, maka menjadi suatu hal yang wajar bila sekarang ini Indonesia harus lebih mengembangkan laut demi tercapianya tujuan nasional. Indonesia menyandang predikat “Negara Maritim” atau negara kepulauan, predikat ini mustahil ditinggalkan, lain halnya dengan predikat “Negara Agraris” yang suatu saat bisa berganti dengan industri. Konsekwensi sifat maritim itu sendiri lebih

mengarah pada terwujudnya aktifitas pelayaran di wilayah Indonesia. Dalam kalimat ini bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dalam membangun perekonomian akan senantiasa dilandasi oleh aktivitas pelayaran. Kilasan sejarah itu tentunya memberi gambaran, betapa kerajaan-kerajaan di nusantara dulu mampu menyatukan wilayah nusantara dan disegani bangsa lain karena, paradigma masyarakatnya yang mampu menciptakan visi maritim sebagai bagian utama dari kemajuan budaya, ekonomi, politik dan sosial. Laut Indonesia merupakan urat nadi perekonomian nasioal dan penggerak lalu lintas ekonomi dunia. Indonesia secara natural lahir dan tumbuh sebagai negara dan bangsa maritim, luar dan dalam.

Hanya faktanya, Indonesia saat ini masih belum menjadi negara maritim dalam pengertian yang sesungguhnya. Sebab, hingga sekarang Indonesia belum menjadi aktor atau pelaku kelautan yang cukup mempuni, baik ditingkat *domestic* maupun global. Padahal, laut Indonesia merupakan urat nadi perekonomian nasional dan penggerak lalu lintas ekonomi dunia. Dunia maritim Indonesia telah mengalami kemunduran yang cukup signifikan, kalau pada zaman dahulu mencapai kejayan baik dalam bidang politik maupun ekonomi, sekarang ini tidak tampak sedikit pun kemajuan yang dapat dilihat. Indonesia yang mempunyai potensi laut sangat besar di dunia kurang begitu memperhatikan sector ini. *(Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/ menuju-poros-maritimdunia/001/ dunia_kerja _ nyata, diakses pada tanggal 13 November 2017, pukul 10:00 WIB)*

Berdasarkan tinjauan sejarah dari berbagai kerajaan di nusantara pada masa lalu, Indonesia sebenarnya adalah negara yang berwatak maritim. Namun demikian, watak kemaritiman tersebut saat ini sudah tidak lagi eksis, beberapa kalangan berkesimpulan agar dapat menjadi bangsa yang kuat dan disegani dimata internasional maka Indonesia harus kembali berwawasan maritim dan bukannya berorientasi daratan (*land minded*).

E. Kerangka Pikir

Gambar 2. Model Kerangka Pemikiran

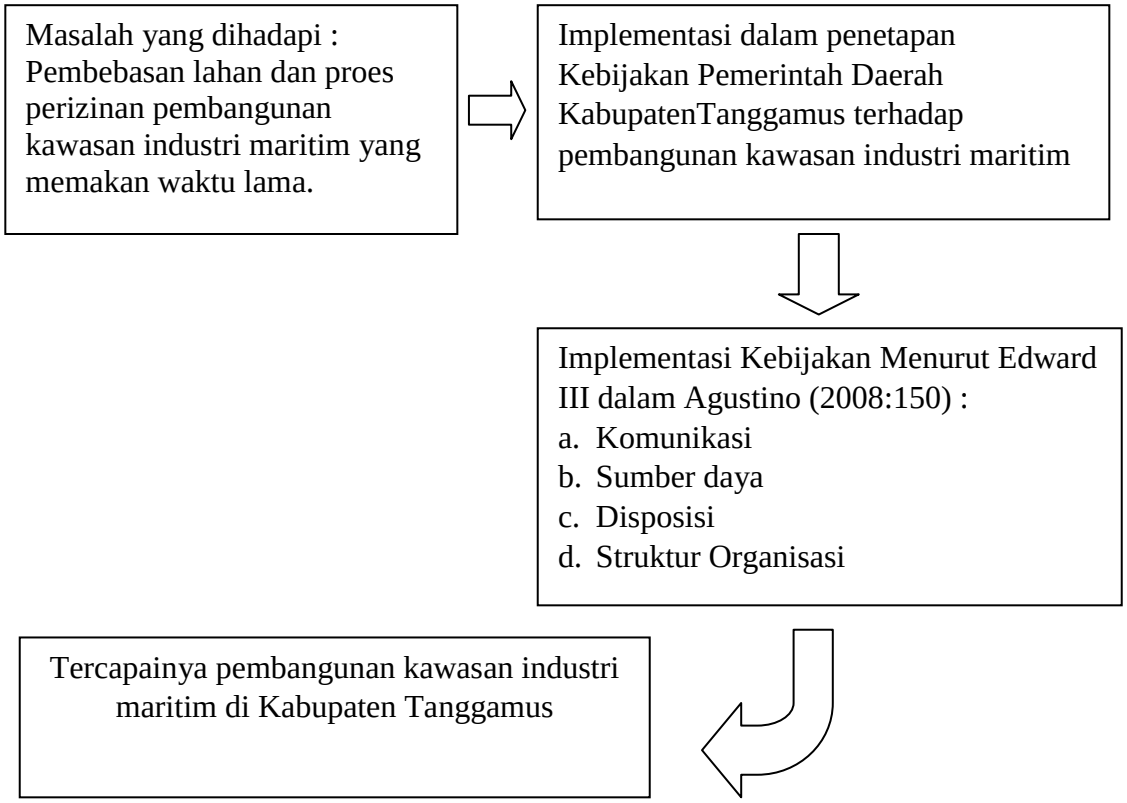

Sumber: Diolah oleh peneliti, tahun 2017

Pengembangan kawasan industri merupakan upaya dalam mendorong tumbuhnya industri nasional dan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan dan pengembangan industri juga sesuai dengan pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, melalui Peraturan Presiden No 1 Tahun 2016 yang diterbitkan pada 8 Januari 2016 yang mengatur tugas Kementerian atau Lembaga untuk mendukung percepatan penyediaan Proyek Strategis Nasional. Maka karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan berdampak luas sehingga perlu diatur oleh Pemerintah. Selain itu, permasalahan yang dihadapi ialah pembebasan lahan dan proses perizinan usaha kawasan industri maritim yang memakan waktu lama.

Melalui pemaparan model-model implementasi diatas, maka peneliti mengadopsi model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh Edward III. Model implementasi inilah yang akan digunakan peneliti di lapangan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus, Pada model ini menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on implementation*. Faktor-faktor penjelasan diatas dan langkah yang akan di teliti oleh peneliti dinilai tepat untuk mencari informasi dengan model dari Edward III.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode ini juga bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Selain itu, metode deskriptif harus searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah.

Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Sementara itu Denzin dan Licoln dalam Moleong (2009:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan Moleong sendiri mendefinisikan penelitian kualitatif

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Metode kualitatif lebih bersifat empiris dan dapat menelaah informasi lebih dalam untuk mengetahui hasil penelitian.

Selain itu Sugiyono (2009:15) menyatakan penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme,* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive,* teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara *holistic*, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpukan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap fenomena dilapangan yang bersifat empiris dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan serta menafsirkan hasil dari penelitian. Peneliti menggunakan model penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini dapat

memberikan gambaran kebijakan dan menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan sampai diperoleh kendala atau hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualiatif disebut juga dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Moleong (2011:93) masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

1. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus ialah dengan indikator sebagai berikut:
   a. Sosialisasi dan koordinasi pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus

      Kebijakan pembangunan kawasan industri maritim ini sudah diadakan pelatihan terlebih dahulu yang diselenggarakan mulai dari Pelatihan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Pelatihan yang diberikan tingkat Kabupaten/Kota pun gencar dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Tanggamus yang bekerja sama dengan Kementrian Kemaritiman sebagai instruksi dari

pusat agar seluruh staf pelaksana sampai pekerja benar-benar siap dan paham dalam melaksanakan pembangunan kawasan industri maritim.

b. Mobilisasi sumber daya untuk pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus

Sumber daya pada pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus sudah cukup memadai dari segi sumber daya manusia, lahan dan penyediaan infrastruktur. Namun pada segi anggaran Pemerintah Daerah Tanggamus belum mentransparasikan anggaran pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus.

c. Kesiapan dan dukungan Pemerintah Daerah Tanggamus dalam Kebijakan Kawasan Industri Maritim

Sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus ditanggapi cukup baik. Dalam hal ini pelaksana kebijakan pembangunan kawasan industri maritim menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pusat. Karena ketika pelaksana memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi Pusat dan Daerah Sebagai Implementor Kawasan Industri Maritim

Pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar intansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembagian

peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan.

2. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Tanggamus dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus

Pemerintah Daerah Tanggamus telah membuka peluang investasi kepada investor untuk mensukseskan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus. Program investasi ini ditujukan bagi seluruh stakeholder dan pihak yang mungkin terlibat dalam pengikutsertaan modal bagi upaya mensukseskan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus, namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan investasi di bidang infrastruktur dan fasilitas kawasan, diantaranya adalah proses pemilihan mitra swasta yang tidak trasnparan, tidak dilibatkannya masyarkat pada proses perencanaan pembangunan infrastruktur dan adanya perselisihan dengan pihak investor yang tidak terselesaikan menurut asas keadilan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penetapan penelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan

penelitian. Menurut Sugiyono, *purposive* adalah lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan didalam lingkup wilayah Kabupaten Tanggamus, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus merupakan lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sebagai pelaksana dalam rangka mendukung percepatan kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus. Selain itu lokasi penelitian yang dipilih untuk menunjang penelitian ini ialah di Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus dan masyarakat setempat sebagaimana pencarian data ini difokuskan untuk kajian implementasi kebijakan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus.

Dengan Kabupaten Tanggamus mempunyai potensi yang sesuai dengan kreteria pembangunan kawasan industri maritim dan lokasi yang strategis maka ditunjuklah Kabupaten Tanggamus sebagai lokasi pembangunan kawasan industri maritim.

D. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Menurut Loftland (1984:47) dalam Basrowi dan Suwandi (2008:169) sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan

menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer yaitu kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data primer ini merupakan inti analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data. Data primer ini contohnya hasil wawancara dan observasi diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data terhadap proses implementasi kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data-data yang diperoleh dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa berita surat kabar, website, artikel profil investasi kawasan industri maritim Kabupten Tanggamus yang didapat dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Tanggamus dan referensi-referensi yang menjadi panduan implementasi kebijakan pembangunan kawasan industri maritim.

E. Tekhnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara sistematik adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut telah tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks.

Oleh karena itu, informasi ditahap awal ini didasarkan pada subjek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data sebagai informan awal dan kemudian berkembang menjadi luas (*snowball sampling*) sampai tidak ditemukan lagi informasi yang berkenaan dengan implementasi kebijakan pembangunan kawasan industri maritim. Sumber data dibawah ini merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami proses pelaksanaan dan perumusan program di lokasi penelitian.

Tabel 2. Daftar Informan

NO	Informan	Wawancara Pendukung	Waktu Wawancara
1	Bapak Drs. Karjiono (Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan)	• Pemerintah Daerah bekerja professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. • Pengawasan terhadap setiap aparat terkait lebih di ekstrakan lagi.	5 October 2017

2	Bapak Yadi Mulyadi, ST (Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang)	• Berusaha untuk memantau kinerja aparat terkait kebijakan ini. • Melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat. • Memberikan arahan kepada pihak investor dalam pemberian bantuan.	5 Oktober 2017
3	Bapak Bastanta Sebayang, SP , MM (Kepala Sub. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah)	• Melaksanakan isi dari kebijakan ini dengan sebaik-baiknya. • Menilai dan mempertimbangkan berkas data yang ada.	1 Oktober 2017
4	Bapak Sujono (Masyarakat Setempat)	• Pembangunan yang harus mengurangi pengangguran. • Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanggamus.	1 Oktober 2017

Sumber : Diolah oleh peneliti, tahun 2017

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang pembangunan kawasan industri maritim. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan meng-*copy* data-data yang dimiliki oleh Kantor Badan Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dokumen didapat langsung dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus.

3. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi pasif, yaitu peneliti tetap bisa mengamati penelitian tanpa harus mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh objek diteliti. Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi pembangunan kawasan

industri maritim di Kabupaten Tanggamus untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus tersebut. Peneliti mengamati mekanisme pengerjaan mulai dari pembuatan jalan, pembukaan lahan sampai proses penetapan lokasi yang ingin dibangun kawasan industri maritim.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data selesai dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap pengolahan data (Miles and Huberman,1992) yaitu : (1) seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian. (2) klasifikasi data, yaitu data yang diperoleh lalu dikumpulkan menurut pokok bahasan yang telah di tetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan. (3) penyusunan data yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan sistematis berdasarkan kerngka tulisan yang telah ditetapkan. Setelah data yang terkumpul selesai diseleksi, kemudian disusun secara sistematis dengan memasukan ke dalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian dilakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan di lakukan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong,2005:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain:

1. Reduksi Data (*Reduction data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan atau data dilapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data

diwujudkan dalam bentuk uraian dan foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan.

Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan penyajian data yang ada. Uraian hasil penelitian dirangkum dalam suatu keterangan mengenai hasil penelitian tersebut. Keterangan tersebut adalah hasil pengecekan ulang tentang fenomena di lapangan yang terjadi, setelah dibandingkan dengan teori yang ada diadakannya suatu penarikan kesimpulan/ verifikasi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. **Implementasi kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2018, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan ini sudah terlaksana secara efektif dengan indikator sebagai berikut:**

   a. Sosialisasi dan koordinasi pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus

   Kebijakan pembangunan kawasan industri maritim ini sudah diadakan pelatihan terlebih dahulu yang diselenggarakan mulai dari Pelatihan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Pelatihan yang diberikan tingkat Kabupaten/Kota pun gencar dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Tanggamus yang bekerja sama dengan Kementrian Kemaritiman sebagai

instruksi dari pusat agar seluruh staf pelaksana sampai pekerja benar-benar siap dan paham dalam melaksanakan pembangunan kawasan industri maritim.

b. Mobilisasi sumber daya untuk pengembangan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus

Sumber daya pada pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus sudah cukup memadai dari segi sumber daya manusia, lahan dan penyediaan infrastruktur. Namun pada segi anggaran Pemerintah Daerah Tanggamus belum mentransparasikan anggaran pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus.

c. Kesiapan dan dukungan Pemerintah Daerah Tanggamus dalam Kebijakan Kawasan Industri Maritim

Sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus ditanggapi cukup baik. Dalam hal ini pelaksana kebijakan pembangunan kawasan industri maritim menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pusat. Karena ketika pelaksana memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi Pusat dan Daerah Sebagai Implementor Kawasan Industri Maritim

Pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar intansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan

tanggungjawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan.

2. **Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Tanggamus dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus**

   Pemerintah Daerah Tanggamus telah membuka peluang investasi kepada investor untuk mensukseskan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus. Program investasi ini ditujukan bagi seluruh stakeholder dan pihak yang mungkin terlibat dalam pengikutsertaan modal bagi upaya mensukseskan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus, namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan investasi di bidang infrastruktur dan fasilitas kawasan, diantaranya adalah proses pemilihan mitra swasta yang tidak trasnparan, tidak dilibatkannya masyarkat pada proses perencanaan pembangunan infrastruktur dan adanya perselisihan dengan pihak investor yang tidak terselesaikan menurut asas keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Sebaiknya dilakukan keterbukaan akses informasi masyarakat, hal ini dinilai penting agar masyarkat dapat mengawal proses pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus.

2. Melakukakan transparansi anggaran agar masyarkat dapat memastikan apakah alokasi anggaran benar-benar telah dibelanjakan guna untuk pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus.
3. Membentuk aturan-aturan dan prosedur terhadap investor asing agar tidak merugikan.
4. Dibentuknya peran badan pengatur atau konsultan dibidang kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar tidak terjadinya perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijakasanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta:Bumi Aksara.

Agustino, Leo.2006. *dasar-dasar kebijakan publik*, Bandung:CV. Alfabet.

Canning, D. 1998. *A Database of World Infrastructure Stock, The World Bank*. Policy Warless Paper.

Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.*Yogyakarta: Gava Media.

Agus Purwanto, Erwan dan Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.

Kartasmita, Ginanjar. 1994. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta:Cerdas.

Kodoatie, Robert J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Maleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.

Sadono, Sukirno, 1995, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Edisi kedua, Jakarta:Penerbit PT.Karya Grafindo Persada.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:Alfabet.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Buku Seru.

Sumber lain:

Ase, Satria. 2010.” Materi Ekonomi : Teori Industri Menurut Para Ahli Dan Pengelompokannya “. http://www.materibelajar.id/2015/12/materi-ekonomi-teori-industri-menurut.html (diakses pada tanggal 16 Oktober 2018)

http://www.mediaindonesia.com/news/read/ pembangunan kawasan industri maritim di mulai 2017/2018-08-18 (diakses pada tanggal 16 Oktober 2017)

http://www.tanggamus.go.id/. (diakses pada tanggal 18 Oktober 2017)

https://www.slideshare.net/samsir07/kemaritiman-indonesia (diakses pada tanggal 20 Februari 2018)